

JURNAL ILMIAH

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM LINGKUP

PERADILAN MILITER

**(Studi terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan
Tindak Pidana Narkotika Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam III/Siliwangi)**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIRDAUS ARIEF CHANDRA

NIM. 0810113282



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM LINGKUP

PERADILAN MILITER

**(Studi terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan
Tindak Pidana Narkotika Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam III/Siliwangi)**

Disetujui Pada Tanggal 28 Oktober 2013

Oleh:

FIRDAUS ARIEF CHANDRA

NIM. 0810113282

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Sudjito S.H. Mhum

NIP. 19520605 198003 1 006

Paham Triyoso S.H. Mhum

NIP. 19540517 198203 1 003

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati S.H. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

Abstraction

In writing this paper the author discusses the Narcotics Crime Investigation In Scope of Military Justice , which focuses on the role of the military command of the Army Military Police In Narcotics Investigation Crime Amongst the Army Pomdam III / Siliwangi.

It is against the backdrop that in a military unit , especially with regard to service members whose actions violate the law, a unified commander has a duty and responsibility to establish, follow and take legal measures in accordance with the duties and responsibilities of authority. As a commander of the environment. TNI certainly demanded its role in fostering subordinate soldiers, according to the authority provided for in article 69 of Law No. 31 of 1997 is as Bosses Punish Eligible as an investigator. Where a unit commander or supervisor who has the right to punish the implementation assisted by Military Police investigators within the military as well as it is followed up by the Military Judge Advocate and a unified commander has two principal or primary function, namely as a supervisor who has the right to punish (ANKUM) and submitters officer case (Papera). Military Police in carrying out its duties and functions as an investigator is often met with resistance, especially during the interrogation of narcotic crime that occurred in the Army.

The purpose of the research is the first to describe and analyze the process of criminal investigations conducted by the Police Narcotics Military Military Command of the Army, the second to describe and analyze the factors that cause the abuse of narcotics in the TNI- AD and the third to describe and analyze the legal obstacles that occur in the investigation of criminal offenses that occur in the environment narcotics Army.

In this thesis the approach used is the juridical empirical research that examines the juridical and empirical aspects of criminal investigations within the military justice Narcotics by Military Police Army Military Command Bandung on juridical aspects in the study conducted on the procedures applicable regulations , and coupled with the literature obtained through the books relating to the role of the Military Police military Command Army narcotic in the investigation of criminal offenses within the scope of military justice . While aspects of the empirical approach to the locus of action in the Military Police Force Military Command DaratkotaBandung in investigating acts pidanaNarkotika.

The results of research conducted on the stage of the investigation process is conducted military police on narcotic cases occur among members of the army are : First , each of the investigations conducted by Pomdam III / SLW, Danpomdam / Wadanpomdam will give direct orders to the section investigations led by executing investigation unit commander rank of Captain and in it there are four and five non-commissioned officer who served as inspector executor investigation . In the event of an act which is considered as an unlawful act committed by Army soldiers

onkum in particular , the community or the police to give his report to Pomdam III / SLW over what is witnessed, known and experienced. After that it will go to the location Pomdam reported to perform reconnaissance for approximately one week of receiving a report is received. If it is not there some irregularities during the reconnaissance reconnaissance will be discontinued due to lack of evidence obtained and when it is alleged that during reconnaissance proved true, then the next process is to conduct raids and arrests in place. Furthermore, the army officers who were caught in the raid will be brought to Pomdam III / SLW to undergo interrogation and search, within 1x24 hour urine examination should have been made to the local health department that has been designated by the Ministry of Health. Narcotics evidence subsequently obtained within three days had to be submitted to the Laboratory (Lab) designated Center for Food and Drug Administration (POM) and subsequently the National Narcotics Agency (BNN) which determines the outcome of the POM hall is included in the type of narcotics or not. After all checks are undertaken , then made a legal opinion letter of suggestions made by trial counsel then submitted to Papera that will make Sekeptera letter to do the trial . If the decision of the judge in the trial verdict of guilt to the perpetrators, the perpetrators will be put into prisons (prisons) Kebun Waru or prisons designated by the military court. For a contributing factor, there are 3 factors (reasons) that can be regarded as a "trigger " a person in a drug penyalahgunakan takterkecuali also be a factor as a member of the Army abusing drugs . The third factor is the factor of self , environmental factors , and factors willingness drug itself. Obstacles encountered in the Army Military Police criminal investigations involving narcotics TNI - AD is the process of law enforcement at the level of investigation and prosecution has been no transparency, yet integrated case management system in the military environment , human resources are limited, facilities and infrastructure insufficient, the supervisory function of the quality of decisions and the conduct of judges is not optimal , and software that is not in harmony with law enforcement pratek .

Keywords : investigation , military police , narcotic crime

A. Latar Belakang

TNI sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman yang timbul baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, selain itu anggota TNI dalam kehidupannya juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga tetap memungkinkan terpengaruh dengan hal-hal negative. Kemungkinan untuk terlibat dengan penyalahgunaan narkoba pun sama besar dengan kemungkinan yang ada pada masyarakat pada umumnya. Karena hal-hal tersebut maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Dengan kata lain, untuk mengatasi seorang anggota TNI, maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang menangani penegakan hukum di lingkup militer dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi Polisi Militer Angkatan Darat.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan anggota prajurit yang melanggar hukum, seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, menindak dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan wewenang tugas

dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang komandan kesatuan lingkungan. TNI tentunya dituntut perannya dalam membina prajurit bawahannya, sesuai kewenangan yang telah diatur dalam pasal 69 UU RI No 31 Tahun 1997 yaitu sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum selaku penyidik. Dimana seorang komandan satuan atau atasan yang berhak menghukum dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Militer selaku penyidik dilingkungan TNI disamping itu ditindak lanjuti oleh Oditur Militer dan seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira penyerah perkara (PAPER)¹.

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan Militer, sedangkan proses penyidikannya dilakukan oleh POM-AD. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM-AD.

Tugas-tugas POM-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM-AD yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas POM-AD yang bersifat represif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD. Disini penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah guna mencapai sasaran yang diharapkan dan menghindari kesimpangsiuran pengertian agar tidak kabur dan tidak terlalu luas. Untuk itu maka penulis membatasi permasalahan pada proses penyidikan tindak pidana narkoba dalam lingkup Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Kodam III/Siliwangi.

B. Rumusan Masalah

¹ Hudoyo, *Hukum Acara Pidana Militer*, Kakundam V, Brawijaya 1992

Dari beberapa uraian dalam latar belakang di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, baik secara teoritik maupun dalam praktek. Oleh karena itu pada karya ilmiah ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan.

Permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodam TNI-AD?
2. Apa faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus Narkotika?
3. Hambatan apa saja yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya TNI-AD?

C. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang penyidikan tindak pidana Narkotika dalam lingkup peradilankodam oleh Polisi Militer Kodam Angkatan Darat kota Bandung terhadap aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan-peraturan yang berlaku, dan ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan Polisi Militer Kodam Angkatan Daratdalam penyidikan tindak pidana narkotika dalam lingkup peradilankodam militer. Sedangkan aspek empirisnya adalah pendekatan terhadap locus in action dari Polisi Militer Kodam Angkatan Darat kota Bandung dalam menyidik tindak pidana Narkotika.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Polisi Militer KodamIII/SiliwangiKota Bandung, alasannya karena lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan selain itu juga sebagai kota metropolitan di Jawa Barat yang menjadi Pusat Pendidikan Polisi Militer dan tempat bersosialisasi bagi segala kalangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau narasumber, yang dilakukan secara langsung sesuai dengan penelitian.Sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dengan pihak yang terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan, mempelajari laporan penelitian, skripsi, dariartikel-artikel yang terkait dengan pidana militer dan narkotika, yakni peraturan perundang-undangan, literature, jurnal-jurnal hukum dan juga dari internet. Yaitu berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - d. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
 - e. Peraturan Disiplin Tentara (PDT)
 - f. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - g. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Nomor 39 Tahun 1947 (KUHPM)
2. Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teori atau doktrin secara relevan yang bersumber dari buku atau literatur dan dari hasil penelitian sebelumnya serta bisa juga mencakup jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berasal dari kamus hukum dan penelusuran situs di internet.

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan kepada petugas yang berwenang tempat penelitian ini dilaksanakan. Agar wawancara berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, wawancara dilakukan secara terbuka dengan instrumen yakni sebuah pedoman wawancara, alat tulis atau alat perekam audio. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang menjadi obyek sentral penelitian ini.

b) Metode Observasi atau Pengamatan

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu subjek penelitian. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati subyek penelitian dengan menggunakan instrument yakni sebuah catatan untuk mencatat apa yang di amati.

c) Studi Dokumen

Merupakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. Serta studi dokumentasi, dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan didapat dari Polisi Militer Kodam III/Siliwangi Angkatan Darat Kota Bandung.

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah :

a. Populasi

Dalam penelitian ini, penulis menentukan populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh petugas lapangan atau pelaksana setempat .Populasi yang diambil adalah seluruh petugas Polisi Militer Kodam III Siliwangi Angkatan Darat.

b. Sampel

Sampel adalah proses memilih suatu bagian dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian petugas pelaksana atau lapangan khususnya para pihak yang terkait.

Sampel yang diambil adalah :

1 (Satu) Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan

1 (Satu) Perwira Pemeriksa Pelaksana Penyidikan

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian, maupun penjelasan. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa proses dan sebagainya. Kembali dikaitkan dengan data lainnya untuk dapat kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistik.

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek.

D. Pembahasan

Praktek penyelenggara peradilan dalam system hukum Negara Indoneia tidak menganut uniform yang mutlak sebagai pembeda dalam menentukan kompetensi peradilan yang ada. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.² Dalam pelaksanaannya memiliki kompetensi peradilan yang berbeda, dalam hal ini ada yang di dasarkan pada subyek, antara lain seperti pada peradilan militer dan

²Undang-undang NO. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

peradilan agama, ada pula yang didasarkan pada jenis kasus seperti peradilan tata usaha Negara.

Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka pengadilan militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.

Dengan terpisahnya subyek militer dalam hal proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, tidaklah mengakibatkan munculnya ketidak tertiban dikalangan militer dan juga tidak mengganggu tata tertib hukum di kalangan masyarakat pada umumnya.

Sebagai suatu sistem hukum, hukum pidana militer selain memiliki substansi undang-undang khususnya hukum pidana militer (materiil dan formil), juga memiliki struktur kelembagaan dalam proses penegakan hukumnya. Selain itu masyarakat juga militer juga memiliki sistem nilai budaya hukum tersendiri yang ada dan dipelihara dalam tata kehidupan keprajuritan.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer berbeda dari struktur organisasi dari pengadilan-pengadilan lain, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan tertulis oleh Mahkamah Agung RI mengenai struktur organisasi yang dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer dalam menata ulang struktur organisasinya, oleh karenanya struktur Organisasi yang dipakai pada saat ini masih berpedoman kepada struktur organisasi yang lama yaitu struktur organisasi Mabes TNI.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, azas Peradilan Militer disamping berpedoman pada azas yang tercantum dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman juga tidak mengabaikan azas tata kehidupan militer yaitu azas kesatuan komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan azas kepentingan Militer.

Peranan hukum pidana militer dalam proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahap yang meliputi :

- a. Tahap Penyidikan
- b. Tahap Penuntutan
- c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Militer
- d. Proses Eksekusi

Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

1. Komandan satuan selaku Ankuam dan atau Papera;
2. Polisi Militer sebagai Penyidik;
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor;
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyidik adalah :

- a. Atasan yang berhak menghukum
- b. Polisi Militer
- c. Oditur

Sedangkan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat
- b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut
- c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankuam adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit

TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Pomdam III/Siliwangi maka dapat dijabarkan bahwa dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam III/Slw, Danpomdam/Wadanpomdam akan memberikan perintah langsung kepada bagian penyidikan yang di pimpin oleh Komandan satuan pelaksana penyidikan berpangkat Kapten dan di dalamnya terdapat empat perwira dan lima bintara yang bertugas sebagai pemeriksa pelaksana penyidikan.

Apabila terjadi suatu perbuatan yang dirasa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD pada khususnya, maka masyarakat atau polisi dapat memberikan laporannya kepada Pomdam III/Slw atas apa yang disaksikan, diketahui dan dialami. Setelah itu maka Pomdam akan menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengintaian selama kurang lebih satu minggu terhitung sejak laporan diterima. Apabila dirasa tidak ada suatu kejanggalan selama pengintaian maka pengintaian akan dihentikan karena kurangnya bukti yang didapat dan apabila hal yang disangkakan selama pengintaian itu terbukti benar, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat.

Selanjutnya oknum TNI-AD yang tertangkap tangan dalam penyeragaman akan dibawa ke Pomdam III/Slw guna menjalani interogasi dan pengeledahan, dalam kurun waktu 1x24 jam harus sudah dilakukan pemeriksaan urin ke dinas kesehatan setempat yang telah ditunjuk oleh kementerian kesehatan.

Barang bukti Narkotika yang didapat selanjutnya dalam waktu tiga hari sudah harus diajukan ke Laboratorium (Lab) yang ditunjuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menentukan hasil dari balai POM tersebut apakah termasuk kedalam jenis narkotika atau tidak.

Setelah semua pemeriksaan yang dijalani, barulah dibuatkan surat saran pendapat hukum yang dibuat oleh Oditur yang kemudian diserahkan kepada Papera yang nantinya membuat surat Sekepera untuk dilakukan proses persidangan. Jika putusan hakim dalam proses persidangan menjatuhkan putusan bersalah kepada pelaku, maka pelaku akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kebon Waru atau lapas yang ditunjuk oleh peradilan militer.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan

dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkotika adalah segala penyalahgunaan penggunaan narkotika ataupun peredaran narkotika yang dilakukan dan menyalahgunai rumusan dalam undang-undang.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunakan narkoba tak terkecuali juga menjadi faktor penyebab seorang anggota TNI-AD menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

Pada dasarnya semua orang diciptakan oleh Tuhan adalah sama dalam hal ini semua manusia dapat melakukan suatu tindakan kesalahan, tidak terkecuali aparat penegak hukum pun. Dalam berbagai kasus yang

telah terjadi, tidak sedikit yang melibatkan bahkan dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum. Dalam skripsi yang penulis buat ini, yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah anggota TNI khususnya TNI-AD. Lepas dari tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan Negara, para anggota TNI merupakan masyarakat yang hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Konsekuensi dari hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat adalah apakah lingkungan sosialisai kita merupakan lingkungan yang baik ataupun sebaliknya. Lingkungan yang baik dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang baik pula, sedangkan lingkungan yang buruk jika kita tidak dapat menjaga dan melindungi diri sendiri maka tidak menutup kemungkinan kita dapat terjerumus pula pada kebiasaan-kebiasaan yang buruk.

Selain tugas yang telah jelas diberikan oleh Negara, para anggota TNI juga memiliki tugas yang berat yaitu menjadi “panutan atau suri tauladan bagi masyarakat”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, para anggota TNI dituntut untuk bergaul dan membaur dengan semua kalangan masyarakat. Namun pada kenyataannya lingkungan masyarakat sangat bermacam-macam, hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab anggota TNI melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana narkoba. Selain lingkungan yang membawa pengaruh, pada saat ini untuk mendapatkan narkoba sangatlah mudah dan harganya sangat terjangkau bagi semua kalangan.

Polisi militer Angkatan Darat dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI-AD seringkali menemui hambatan, seperti :

1. Proses Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan Belum Ada Transparansi, karena sesuai ketentuan pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer, hal ini dilakukan tanpa kontrol publik sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang

No. 14 tahun 2008 yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang tidak boleh dipublikasikan. Belum adanya akses publik ditingkat penyidikan dan penuntutan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berpengaruh langsung terhadap Penjatuhan Hukuman bagi prajurit pelaku tindak pidana narkoba.

2. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara di Lingkungan TNI

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, yang disebabkan belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan teknologi informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI. Berdasarkan pengalaman di banyak negara, penggunaan TI masih menitikberatkan pada upaya-upaya pencatatan elektronik saja. TI belum dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja badan peradilan. Oleh karena itu, inisiatif TI yang dilakukan tidak memberikan hasil memuaskan bagi lembaga peradilan. Salah satu penyebabnya adalah Badan Peradilan gagal dalam menetapkan peran dan arah strategis TI didalam organisasi peradilan itu sendiri. Kegagalan ini berpotensi menciptakan ketidakmampuan dalam memetik hasil maksimal, bahkan dalam implementasi TI itu sendiri.

3. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

Permasalahan yang dihadapi untuk menghasilkan produk yang berkualitas adalah masih terbatasnya personel yang berkualitas yang

mampu menerapkan hukum dengan cepat dan tepat, sehingga menghambat proses penegakan hukum tindak pidana narkoba, selain itu jumlah (kuantitas) aparat penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terbatas, hal ini dapat menghambat proses penanganan perkara.

4. Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Tindak pidana narkoba saat ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dunia peradilan dalam melaksanakan tugas pokoknya juga harus di dukung oleh Iptek yaitu berupa peralatan yang dapat memudahkan proses pengungkapan fakta yang di dukung oleh alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peralatan yang dapat membantu pengungkapan fakta baik di tingkat penyidikan maupun ditingkat pengadilan seperti alat pendeteksi kebohongan (lie detector), laboratorium kriminal dan peralatan lainnya yang berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian perkara dengan cepat.

5. Fungsi Pengawasan Terhadap Kualitas Putusan dan Prilaku Hakim Belum Optimal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Dilmiltama berwenang untuk mengadakan pengawasan teknis yustisial terhadap Pengadilan Militer dibawahnya dalam penyelesaian perkara, tingkah laku dan tindakan para hakim militer, agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan baik dan benar serta transparan. Fungsi pengawasan terhadap kualitas putusan dan prilaku Hakim ini telah berjalan namun belum optimal khususnya dalam pelaksanaan pengawasan teknis yustisial yang seharusnya direncanakan dalam program kerja Dilmiltama (Pengadilan Militer Utama) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

6. Peranti Lunak yang Tidak Selaras dengan Praktek Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan hukum formil (hukum acara) dalam sistem Peradilan Militer saat ini. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan ilmu hukum maka ditemui beberapa kelemahan yang terdapat dalam sistem Peradilan Militer yang di terapkan saat ini. Menurut pendapat penulis kelemahan tersebut ada pada 3 (tiga) komponen penegakan hukum yang terdiri dari substansi, struktur, dan kultur.

E. Penutup

Proses penyidikan pada tindak pidana narkoba dalam lingkup peradilan militer yang dilakukan Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Pomdam III/ Siliwangi adalah dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam III/Slw, Danpomdam/Wadanpomdam akan memberikan perintah langsung kepada bagian penyidikan yang di pimpin oleh Komandan satuan pelaksana penyidikan berpangkat Kapten dan di dalamnya terdapat empat perwira dan lima bintara yang bertugas sebagai pemeriksa pelaksana penyidikan.

Apabila terjadi suatu perbuatan yang dirasa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh onkum prajurit TNI-AD pada khususnya, maka masyarakat atau polisi dapat memberikan laporanya kepada Pomdam III/Slw atas apa yang disaksikan, diketahui dan dialami. Setelah itu maka Pomdam akan menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengintaian selama kurang lebih satu minggu terhitung sejak laporan diterima. Apabila dirasa tidak ada suatu kejanggalan selama pengintaian maka pengintaian akan dihentikan karena kurangnya bukti yang didapat dan apabila hal yang disangkakan selama pengintaian itu terbukti benar, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat.

Selanjutnya oknum TNI-AD yang tertangkap tangan dalam penyerpapan akan dibawa ke Pomdam III/Slw guna menjalani interogasi dan penggeledahan, dalam kurun waktu 1x24 jam harus sudah dilakukan pemeriksaan urin ke dinas kesehatan setempat yang telah ditunjuk oleh kementrian kesehatan.

Barang bukti Narkotika yang didapat selanjutnya dalam waktu tiga hari sudah harus diajukan ke Laboraturium (Lab) yang ditunjuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menentukan hasil dari balai POM tersebut apakah termasuk kedalam jenis narkotika atau tidak.

Setelah semua pemeriksaan yang dijalani, barulah dibuatkan surat saran pendapat hukum yang dibuat oleh Oditur yang kemudian diserahkan kepada Papera yang nantinya membuat surat Sekeptera untuk dilakukan proses persidangan. Jika putusan hakim dalam proses persidangan menjatuhkan putusan bersalah kepada pelaku, maka pelaku akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kebon Waru atau lapas yang ditunjuk oleh peradilan militer.

Faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus Narkotika ada 3. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri. Lepas dari tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan Negara, para anggota TNI merupakan masyarakat yang hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Konsekuensi dari hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat adalah apakah lingkungan sosialisai kita merupakan lingkungan yang baik ataupun sebaliknya. Lingkungan yang baik dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang baik pula, sedangkan lingkungan yang buruk jika kita tidak dapat menjaga dan melindungi diri sendiri maka tidak menutup kemungkinan kita dapat terjerumus pula pada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Selain tugas yang telah jelas diberikan oleh Negara, para anggota TNI juga memiliki tugas yang berat yaitu menjadi “panutan atau suri

tauladan bagi masyarakat”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, para anggota TNI dituntut untuk bergaul dan membaur dengan semua kalangan masyarakat. Namun pada kenyataannya lingkungan masyarakat sangat bermacam-macam, hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab anggota TNI melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana narkoba. Selain lingkungan yang membawa pengaruh, pada saat ini untuk mendapatkan narkoba sangatlah mudah dan harganya sangat terjangkau bagi semua kalangan.

Hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI-AD adalah mengenai proses penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan belum ada transparansi, belum terintegrasinya system penanganan perkara di lingkungan TNI, sumber daya manusia masih terbatas, sarana dan prasarana belum memadai, fungsi pengawasan terhadap kualitas putusan dan perilaku hakim belum optimal, dan peranti lunak yang tidak selaras dengan praktek penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hudoyo, *Hukum Acara Pidana Militer*, Kakundam V, Brawijaya 1992

Undang-undang NO. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman